

Literasi Digital Sebagai Fondasi Pendidikan Politik Generasi Muda Era Digital

Yunita Sari*, Sunarso, Suyato

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*yunita169fishipol.2024@student.uny.ac.id

Abstract

This study examines the role of digital literacy as a fundamental element in strengthening political education for the younger generation in the digital age. Using a qualitative descriptive method through literature study, this study identifies and analyzes various literature related to digital literacy and political education. The results show that conventional political education is still limited by space and time, while digital-based political education provides broader and more flexible access. Digital literacy is a determining factor in the effectiveness of digital political education because it equips the younger generation with critical thinking skills, the ability to counter disinformation, and the ability to participate responsibly in democratic life. Theoretically, this study contributes to the development of a conceptual model that links digital literacy with political participation. Practically, the results of this study provide recommendations for policymakers and educators in integrating digital literacy into the civic and political education curriculum.

Keywords: Digital Era; Young Generation; Digital Literacy; Political Education

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran literasi digital sebagai elemen fundamental dalam penguatan pendidikan politik bagi generasi muda di era digital. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai literatur terkait literasi digital dan pendidikan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik konvensional masih terbatas oleh ruang dan waktu, sedangkan pendidikan politik berbasis digital memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel. Literasi digital menjadi faktor penentu efektivitas pendidikan politik digital karena membekali generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, menangkal disinformasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model konseptual yang mengaitkan literasi digital dengan partisipasi politik. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pendidik dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan politik.

Kata Kunci : Era Digital; Generasi Muda; Literasi Digital; Pendidikan Politik

Pendahuluan

Era digital telah secara signifikan mengubah cara generasi muda berinteraksi dan berpartisipasi dalam ranah politik. Media sosial seperti Tiktok, Instagram, Youtube kini menjadi ruang publik baru tempat opini politik dibentuk dan disebar (Duek & Nilsberth, 2024). Meskipun demikian, kemajuan ini turut menghadirkan tantangan besar berupa penyebaran disinformasi, hoax, serta polarisasi pandangan yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Berdasarkan survei di 16 negara di dunia oleh IPSOS dan UNESCO bahwa terdapat 56% responden menyatakan bahwa media sosial sebagai

sumber utama informasi (data ini dikonfirmasi di Inggris oleh Survei Konsumsi Berita Ofcom terdapat 59% responden menggunakan media sosial sebagai sumber utama berita, terdapat 87% responden menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya disinformasi. Situasi ini menegaskan pentingnya literasi digital sebagai keterampilan dasar warga negara dalam era demokrasi digital (Abrusci, 2024; McDougall et al., 2018; Polizzi, 2025).

Fenomena politik digital menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam diskursus publik. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu beradaptasi dengan konteks digital supaya lebih relevan dan inklusif. Taylor & Gibson (2017) menyatakan bahwa partisipasi digital dapat memperkuat praktik demokrasi apabila didukung oleh kemampuan literasi digital yang memadai. Disisi lain, pendidikan politik konvensional masih menghadapi kendala dalam hal ruang, waktu, serta pendekatan pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan realitas digital (Fitriani, 2024; Senora, 2025).

Kesenjangan antara pendidikan politik konvensional dan kebutuhan generasi digital memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana literasi digital dapat menjadi landasan dalam memperkuat pendidikan politik. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan politik di sekolah, meskipun telah diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), belum sepenuhnya mampu membentuk kemampuan berpikir kritis dan partisipasi politik aktif peserta didik (Estyani Cahya & Nasiwan, 2024). Oleh karena itu, integrasi literasi digital dalam pendidikan politik merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital.

Permasalahan tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, muncul rumusan masalah yang menjadi fokus kajian yaitu bagaimana peran literasi digital dalam memperkuat pendidikan politik generasi muda di era digital?, lalu penelitian ini bertujuan untuk menemukan, membandingkan, dan mendeskripsikan peran literasi digital sebagai fondasi pendidikan politik generasi muda melalui pendekatan analisis literatur. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model konseptual pendidikan politik berbasis literasi digital serta menyampaikan rekomendasi praktis bagi dunia pendidikan dan para pembuat kebijakan dalam membangun ekosistem politik digital yang sehat, partisipatif, dan demokratis.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian ini dipilih karena fokus utamanya adalah menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan guna memahami fenomena literasi digital sebagai dasar pendidikan politik bagi generasi muda di era digital. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari buku dan artikel jurnal yang membahas isu literasi digital dan pendidikan politik. Adapun kriteria dalam pemilihan literatur meliputi, pertama kesesuaian dengan topik penelitian khususnya yang membahas literasi digital, pendidikan politik, dan partisipasi generasi muda. Kedua terbit dalam rentang waktu 2016-2025 untuk menjamin relevan dan aktualitas informasi. Ketiga memiliki kredibilitas akademik baik terindeks secara nasional maupun internasional. Keempat menyajikan temuan empiris atau konseptual yang dapat digunakan dalam penyusunan analisis tematik. Lalu proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan utama yaitu: 1) Identifikasi: menyeleksi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian dan mengeliminasi sumber yang tidak memenuhi kriteria. 2) Kategorisasi: mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama seperti pendidikan politik

konvensional, pendidikan politik digital, literasi digital, partisipasi politik generasi muda. 3) Analisis tematik: mengkaji isi setiap literatur untuk menemukan pola, keterkaitan, dan perbedaan antar penelitian yang telah dilakukan. 4) Sintesis hasil: mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber menjadi narasi konseptual yang menjawab rumusan masalah penelitian. Seluruh tahapan dilakukan secara induktif, dimana data dari berbagai sumber dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peran literasi digital dalam memperkuat pendidikan politik generasi muda. Hasil akhir dari proses ini disusun secara deskriptif untuk menjelaskan hubungan antar konsep serta kontribusi teoretis terhadap pengembangan pendidikan politik di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Juwandi et al., (2019) mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendidikan politik dalam rangka pengembangan literasi digital warga negara menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengintegrasikan pendidikan politik. Meskipun demikian, masih terdapat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya pada masa pemilu 2019. Media sosial juga terbukti menjadi medium potensial untuk mendorong partisipasi politik generasi muda, khususnya pemilih pemula. Sementara itu, kajian dari Rahman (2018) mengenai konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui pendidikan kewarganegaraan menegaskan bahwa pendekatan tersebut memiliki nilai esensial sebagai bentuk pendidikan politik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta terdorong untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan politik. Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada fokus pembahasannya dari Rahman (2018) menitikberatkan pada pendidikan kewarganegaraan tanpa membahas literasi digital, sedangkan Juwandi et al., (2019) menyoroti literasi digital tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan dua hal di atas, maka sintesis dari kedua pendekatan tersebut menjadi landasan krusial dalam penelitian ini, yakni menekankan perlunya pendidikan politik berbasis literasi digital untuk membentuk generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan model pendidikan politik baru yang mengintegrasikan ranah kognitif kewarganegaraan dan keterampilan digital secara simultan, sesuatu yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukri et al., (2024) dengan judul *Literasi Digital: Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan Politik dalam Pemilu 2024* mengungkapkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana edukatif untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Selain itu, literasi digital dianggap krusial dalam mencegah penyebaran hoax dan informasi politik yang menyesatkan. Kajian dari Hidayah, Hardian, Suryaningsih, (2021) melalui studi literatur bertajuk *Gagasan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda* menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam mengatasi sikap apatis generasi muda terhadap isu politik. Lalu pendapat dari Sukri et al., (2024) menekankan pada literasi digital sebagai upaya preventif terhadap disinformasi, maka Hidayah, Hardian, Suryaningsih (2021) lebih fokus pada urgensi pendidikan politik tanpa mengintegrasikan aspek digital. Perbandingan ini memperlihatkan perlunya pendekatan politik yang tidak hanya membangkitkan kesadaran politik, tetapi juga memperkuat literasi digital bagi generasi muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Ribeiro et al., (2023) menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan strategi penting untuk mencegah dampak negatif dari pemilih yang belum matang secara politik. Akan tetapi yang menjadi fokus pada

penelitian ini terletak pada pembentukan pemilih yang kompeten dan rasional. Sebaliknya Senora (2025) menyoroti tantangan utama pendidikan politik di era digital, yakni rendahnya tingkat literasi digital di tengah maraknya penyebaran berita palsu. Dalam konteks ini, maka literasi digital menjadi elemen integral dalam pendidikan politik karena berperan dalam membentuk generasi muda yang kritis, rasional, dan selektif terhadap informasi politik. Perbandingan antara kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa Ribeiro lebih menekankan pada kompetensi pemilih, sedangkan Senora menyoroti literasi digital sebagai penentu efektivitas pendidikan politik di era digital.

Sintesis dari berbagai penelitian tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa pendidikan politik merupakan aspek mendasar dalam pembentukan kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama bagi generasi muda. Pendidikan politik konvensional memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan waktu, sedangkan pendekatan berbasis digital mampu menjangkau masyarakat secara cepat, luas, dan inklusif. Namun, pendidikan politik digital tidak cukup hanya menyampaikan informasi secara daring, melainkan harus menjadi strategi untuk membentuk generasi muda yang kritis, berintegritas, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan demokratis. Literasi digital dalam hal ini menjadi fondasi utama yang memungkinkan generasi muda untuk menilai, memverifikasi, dan merespons informasi politik secara bijak. Maka tingkat literasi digital yang tinggi akan menentukan keberhasilan pendidikan politik di era digital.

Melalui pemanfaatan platform media sosial seperti Tiktok, Instagram, Youtube, dan X (Twitter) menjadi salah satu cara untuk mengintegrasikan pendidikan politik secara efektif. Platform-platform tersebut berfungsi sebagai media edukatif yang mampu menjangkau publik tanpa batasan geografis dan waktu. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti penyebaran hoax, kesenjangan digital antar wilayah, serta adanya perbedaan kemampuan literasi digital antarindividu masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Ruang digital juga menjadi arena propaganda politik yang dapat memengaruhi opini publik secara masif apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etis dalam bermedia.

Temuan ini sejalan dengan teori Kahne & Bowyer (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan literasi media dapat meningkatkan keterlibatan politik digital melalui kesadaran berpikir kritis, partisipasi digital yang bermakna, serta kemampuan memilah informasi politik yang kredibel. Literasi digital dalam konteks ini bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan sarana pembentukan partisipasi politik yang reflektif dan bertanggung jawab. Polizzi (2025) turun menekankan konsep *digital literacy and strategic engagement* yang berorientasi pada kemampuan strategis individu dalam memanfaatkan ruang digital secara sadar dan kritis. Melalui kemampuan tersebut, generasi muda tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga aktor aktif yang berkontribusi dalam membentuk wacana publik yang konstruktif. Dengan demikian, pendidikan politik berbasis literasi digital sangat bergantung pada kemampuan generasi muda dalam mengembangkan pemikiran kritis, kesadaran etis, dan keterampilan strategis dalam berinteraksi di ruang digital guna memperkuat partisipasi politik yang demokratis.

1. Pendidikan Politik Konvensional VS Digital

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Schmidbauer et al., (2024) pendidikan politik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Penelitian tersebut membandingkan dua bentuk partisipasi yaitu *online* dan *offline*, hasilnya menunjukkan bahwa media digital memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan partisipasi politik karena mampu menyampaikan informasi secara cepat, interaktif, dan tanpa batasan ruang. Partisipasi politik *online* dinilai lebih efektif dalam menarik minat generasi muda karena selaras dengan kebiasaan mereka yang lekat

sekali dengan dunia digital. Sebaliknya, partisipasi *offline* dianggap kurang optimal karena bersifat terbatas secara geografis dan waktu, serta membutuhkan interaksi tatap muka yang tidak selalu mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Penelitian Vaccari & Valeriani (2018) memperkuat temuan tersebut dengan menjelaskan bahwa komunikasi politik digital memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan konvensional. Melalui ruang digital, percakapan politik berlangsung secara terbuka, responsif, dan partisipatif. Media digital memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan aktor politik, menyampaikan opini, dan mendiskusikan isu-isu kebijakan secara *real-time*. Proses komunikasi politik melalui media digital mendorong terbentuknya budaya dialog yang lebih egaliter. Setiap individu memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dalam wacana publik tanpa terhalang oleh jarak geografis maupun status sosial. Sebaliknya, pendekatan komunikasi politik konvensional yang mengandalkan pertemuan langsung cenderung bersifat hierarkis dan terbatas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi yang bermakna antarwarga.

Efektifitas pendidikan politik digital tidak semata-mata bergantung pada pemanfaatan media digital, melainkan pada keberadaan mekanisme komunikasi dua arah yang bersifat interaktif. Platform seperti Zoom, Youtube, Live, Instagram Live, dan X (Twitter) memungkinkan proses pembelajaran politik dapat berlangsung secara dinamis melalui ruang diskusi langsung secara digital adanya sesi tanya jawab misalnya webinar dan seminar serta adanya kolaborasi ide. Komunikasi dua arah ini memperkuat pemahaman politik karena peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam membentuk makna melalui dialog. Interaksi langsung memungkinkan peserta untuk mengonfirmasi pemahaman, mengkritisi pandangan yang berbeda, dan menyusun argumentasi politik berdasarkan data serta refleksi kritis. Berbeda dari model pembelajaran satu arah yang membuat peserta cenderung lebih pasif, komunikasi interaktif dalam ruang digital menciptakan pengalaman belajar yang lebih reflektif dan kontekstual.

Lebih dari itu, komunikasi interaktif dalam ruang digital turut berkontribusi terhadap pembentukan literasi politik yang mendalam dan berkelanjutan. Peserta memperoleh kesempatan untuk memahami kompleksitas isu politik melalui eksplorasi berbagai sudut pandang yang muncul dalam diskusi daring. Interaksi kolaboratif hal ini mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, penilaian terhadap kredibilitas sumber informasi, serta pengaitan isu politik dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pola komunikasi semacam ini akan menghasilkan pembelajaran politik yang bersifat partisipatif dan dialogis, di mana pemahaman politik tidak hanya diukur dari jumlah informasi yang diterima, tetapi dari kemampuan peserta dalam menafsirkan dan merefleksikan makna politik secara kolektif.

Sintesis konseptual dari penelitian Schmidbauer et al., (2024) dan Vaccari & Valeriani (2018) menunjukkan bahwa kualitas interaksi dua arah menjadi kunci efektivitas pendidikan politik digital. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter warga negara digital yang aktif, rasional, dan bertanggung jawab. Temuan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap inovasi pendidikan politik digital yakni perlunya pergeseran dari model pembelajaran satu arah menuju pendekatan yang dialogis, kolaboratif, dan berbasis literasi digital. Kesimpulan dari uraian ini menegaskan bahwa pendidikan politik dalam era digital bukan sekadar alat untuk menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi, melainkan juga sebagai ruang penguatan kewargaan digital. Melalui pendekatan ini, generasi muda terdorong untuk berpartisipasi secara sadar dan strategis dalam kehidupan politik modern.

Dengan demikian, efektivitas pendidikan politik digital tidak hanya bergantung terhadap akses teknologi saja, tetapi pada kualitas komunikasi interaktif yang memungkinkan partisipasi reflektif. Maka temuan ini memperluas pemahaman teoritis tentang pendidikan politik digital sebagaimana dijelaskan oleh Kahne & Bowyer (2017) dimana literasi media berperan sebagai penggerak utama kesadaran politik yang partisipatif dan kritis.

2. Literasi Digital Sebagai Penguat Partisipasi

Literasi digital berarti kemampuan seorang individu dalam menggunakan teknologi secara efektif, etis, dan kritis, yang memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat pada berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Li & Li, 2022; Park et al., 2023). Literasi ini tidak hanya memperkuat dalam keterampilan teknis untuk mengakses informasi, melainkan juga mengasah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta rasa kesadaran sebagai warga negara di ruang digital (Wui et al., 2025). Keterlibatan sosial dan kewarganegaraan semakin diperkuat melalui literasi digital, hal ini terbukti dengan meningkatkan kesejahteraan serta partisipasi sosial lintas kelompok masyarakat (Zainal Abiddin et al., 2022). Sementara itu, bagi para generasi muda dengan memanfaatkan literasi digital sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi sipil. Akses terhadap informasi dan keterlibatan dalam diskusi daring mengenai isu sosial-politik dapat mendorong mereka menjadi warga digital yang aktif (Kim & Yang, 2016; Sarifin et al., 2025). Lingkungan pendidikan yang terbuka terhadap pembahasan isu-isu mengenai sosial-politik juga turut memperkuat literasi digital dan meningkatkan partisipasi sipil secara daring (Moon & Bai, 2020).

Pengembangan literasi digital sangat bergantung terhadap strategi berbasis komunitas yang menyediakan infrastruktur memadai serta akses teknologi yang merata. Pendidikan formal dan informal memiliki kontribusi penting, pendidikan formal memberikan pelatihan terstruktur dan pengakuan kompetensi. Sedangkan pendidikan informal seperti kegiatan di pusat komunitas menawarkan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Dengan adanya kolaborasi ini maka membuka peluang terciptanya akses pembelajaran digital yang lebih inklusif dan adil (De Coninck et al., 2025).

Terdapat tantangan dan hal ini tentu perlu untuk diatasi. Adanya hambatan utama yakni keterbatasan infrastruktur digital, konektivitas internet yang belum merata, serta rendahnya kesadaran dan keamanan siber, khususnya di wilayah pedesaan. Solusi yang dibutuhkan ialah pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan pembelajaran formal dan informal secara sinergis (Setiansah et al., 2024). Pendekatan ini harus mempertimbangkan kondisi sosial, material, serta keberagaman kebutuhan masyarakat agar program literasi digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Nash & Wakefield, 2025).

Secara keseluruhan peran literasi digital menjadi sangat penting sebagai penggerak partisipasi masyarakat modern. Literasi ini tidak hanya memperkuat keterlibatan sosial dan politik, melainkan juga memberdayakan kelompok marginal serta memperluas akses terhadap layanan publik. Penguatan ekosistem pembelajaran digital yang inklusif, perlunya pengembangan program berbasis komunitas, serta pengurangan kesenjangan akses teknologi akan menjadikan literasi digital sebagai fondasi kuat bagi partisipasi aktif, kesetaraan sosial, dan kewargaan digital yang demokratis.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, literasi digital berfungsi ganda yakni sebagai prasyarat teknologi dan sebagai katalis partisipasi politik reflektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi digital seseorang, semakin besar peluangnya untuk berpartisipasi aktif dalam diskursus politik yang rasional dan inklusif.

3. Tantangan dan Peluang Digitalisasi Politik

Digitalisasi dalam ranah politik telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika pendidikan politik di era kontemporer. Meskipun demikian, transformasi ini juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu dikategorikan secara sistematis agar dapat dianalisis secara menyeluruh. Tantangan dalam pendidikan politik digital dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama yakni teknis, etis, dan sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran politik berbasis digital.

Pertama, tantangan teknis meliputi persoalan infrastruktur dan keterampilan digital. Salah satu yang menjadi isu utama yaitu penyebaran hoax dan informasi yang tidak akurat dan mudah sekali tersebar melalui platform digital. Dengan banyaknya informasi yang bias sehingga menyebabkan masyarakat menjadi ragu terhadap keabsahan berita. Selain itu, adanya kesenjangan digital tetap menjadi hambatan besar karena tidak semua orang memiliki akses dan kemampuan yang setara dalam menggunakan teknologi informasi. Masyarakat pedesaan, misalnya seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses internet dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih dominan dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam partisipasi politik digital. Di sisi lain, adanya ketergantungan terhadap platform digital untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi secara politik juga berpotensi menimbulkan bias algoritmik dan polarisasi opini publik (Polizzi, 2025).

Kedua, terdapat tantangan etis berkaitan dengan manipulasi informasi, propaganda politik serta kebebasan berekspresi di ruang digital. Latief & Triuspita (2024) menyatakan bahwa media sosial sering digunakan sebagai alat kampanye politik yang manipulatif dan sarat propaganda. Kahne & Bowyer (2019) juga telah mengungkapkan bahwa generasi muda sangat rentan terhadap misinformasi, sehingga kerap menolak informasi yang benar karena telah mempercayai berita yang keliru. Dalam hal ini maka menunjukkan bahwa literasi etis dan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi digital masih sangat terbatas. Meskipun ruang digital memungkinkan kebebasan berekspresi, sering kali kebebasan tersebut disalahgunakan melalui narasi yang tidak etis dan provokatif. Lilja et al., (2024) menambahkan bahwa dengan lemahnya literasi media dan etika komunikasi digital dapat mengancam kualitas demokrasi dengan memperparah penyebaran disinformasi di ruang publik.

Ketiga, tantangan sosial muncul dari ketimpangan akses, adanya perbedaan tingkat literasi digital, serta dinamika sosial-politik di dunia maya. Suhariyanto & Rozak (2025) menyoroti bahwa teknologi internet memiliki dua sisi yakni satu sisi akan memberikan peluang bagi generasi muda untuk dapat berdiskusi, belajar, dan berpartisipasi dalam politik, akan tetapi sisi lainnya juga memunculkan masalah seperti pencarian keuntungan pribadi dalam politik dan ekonomi, serta adanya kampanye hitam yang merusak etika demokrasi. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi di media sosial turut serta memperkuat polarisasi politik dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi publik (Gaultney et al., 2022). Lalu Römer (2024) juga telah menekankan bahwa kesenjangan literasi digital di kalangan pemuda berdampak pada rendahnya partisipasi politik yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi.

Berbagai tantangan teknis, etis, dan sosial tersebut menunjukkan pentingnya merancang strategi pendidikan politik digital yang adaptif dan berkelanjutan. Terjadinya peralihan menuju solusi konseptual dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum literasi digital yang tidak hanya menekankan penguasaan teknologi (aspek teknik), melainkan juga memperkuat dimensi etis dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan politik di era digital perlu diarahkan untuk membentuk individu yang mampu berpikir rasional, memverifikasi informasi, dan menyampaikan opini secara bertanggung jawab (Kahne & Bowyer, 2017). Sejalan dengan temuan Anstead et al., (2025) literasi media

yang dikembangkan secara sistematis terbukti efektif dalam mengurangi paparan misinformasi dan memperkuat partisipasi politik digital yang sehat. Dalam konteks ini, maka kolaborasi antar lembaga menjadi faktor kunci yaitu institusi pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan penyedia platform digital perlu bersinergi untuk membangun ekosistem literasi digital yang demokratis dan inklusif (Hassoun et al., 2025). Sinergi tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada sekaligus membuka peluang bagi digitalisasi politik sebagai sarana pembelajaran partisipatif bagi generasi muda.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Studi ini belum melakukan observasi empiris langsung institusi pendidikan dan belum memetakan secara luas variasi tingkat literasi digital di kalangan para generasi muda. Selain itu, semakin adanya isu penyebaran hoax dan propaganda politik yang belum sepenuhnya dapat ditangani secara efektif. Hal ini dengan demikian, penelitian ini memberikan adanya kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa pendidikan politik konvensional dapat diadaptasi menjadi pendidikan politik digital yang menekankan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, dan kompetensi komunikasi digital. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa literasi digital merupakan fondasi utama dalam membentuk warga negara aktif, partisipatif, dan bertanggung jawab di era digital. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi aspek implementatif melalui studi lapangan di institusi pendidikan formal, maupun non-formal guna menilai efektivitas model pendidikan politik digital yang berkelanjutan.

Ketiga dimensi tantangan tersebut telah memperlihatkan bahwa keberhasilan dari digitalisasi politik tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan oleh keseimbangan antara kapasitas teknis, kesadaran etis, dan kehoesi sosial. Sintesis ini telah memperkuat pandangan Polizzi (2025) tentang pentingnya strategi *engagement* dalam menjaga rasionalitas publik di tengah derasnya arus informasi digital. Dengan demikian, pendidikan politik digital berpotensi menjadi arena pembentukan warga negara digital yang reflektif, etis, dan adaptif terhadap perubahan teknologi politik global.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital menjadi landasan utama dalam pendidikan politik bagi generasi muda di era digital. Melalui penguasaan literasi digital yang baik maka peserta didik maupun generasi muda mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengenali informasi yang menyesatkan, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang publik. Selanjutnya terdapat perbedaan antara pendekatan pendidikan politik konvensional dan digital. Model konvensional memiliki keterbatasan ruang dan waktu, sedangkan pendekatan digital menawarkan jangkauan yang lebih luas, interaktivitas yang lebih tinggi dan fleksibel sehingga dapat mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Akan tetapi, keberhasilan pendekatan digital sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dua arah serta penguatan kesadaran etis dalam penggunaan media digital. Pemerintah bersama lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam memperluas akses dan pelaksanaan pendidikan politik berbasis digital. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang merata, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum, serta kolaborasi lintas sektor guna membangun ekosistem pembelajaran politik yang demokratis dan berkelanjutan. Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosial-politik dengan menawarkan kerangka teoretis baru mengenai integrasi antara literasi digital dan pendidikan politik. Integrasi ini diposisikan sebagai strategi untuk membentuk warga negara digital yang reflektif, kritis, dan adaptif terhadap dinamika teknologi politik global.

Daftar Pustaka

- Abiddin, Z. N., Ibrahim, I., & Abdul Aziz, S. A. (2022). Advocating Digital Literacy: Community-Based Strategies and Approaches. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(1), 198.
- Abrusci, E. (2024). The UK Online Safety Act, the EU Digital Services Act and online disinformation: is the right to political participation adequately protected?*. *Journal of Media Law*, 16(2), 441.
- Anstead, N., Edwards, L., Livingstone, S., & Stoilova, M. (2025). The Potential for Media Literacy to Combat Misinformation: Results of a Rapid Evidence Assessment. *International Journal of Communication*, 19, 2129–2151.
- De Coninck, D., Waechter, N., & D’Haenens, L. (2025). Unraveling the Engagement Paradox: High Civic Engagement Among Vulnerable European Youth in the Digital Age. *Journal of Applied Youth Studies*, 8(2), 249–267.
- Duek, S., & Nilsberth, M. (2024). Languages and identity constructions in multilingual students’ digital literacy practices. *Education Inquiry*, 15(3), 295–311.
- Estyani Cahya, D., & Nasiwan, N. (2024). Tipologi Partisipasi Politik Generasi Z ditinjau dari Pendidikan Politik Melalui PPKn dan Akses Media Sosial. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(12), 1053–1063.
- Fitriani, Y. (2024). *Pendidikan Politik*. Sada Kurnia Pustaka : Banten.
- Gaultney, I. B., Sherron, T., & Boden, C. (2022). Political polarization, misinformation, and media literacy. *Journal of Media Literacy Education*, 14(1), 59–81.
- Hassoun, A., Beacock, I., Carmody, T., Kelley, P. G., Goldberg, B., Kumar, D., Murray, L., Park, R. S., Sarmadi, B., & Consolvo, S. (2025). Beyond Digital Literacy: Building Youth Digital Resilience Through Existing “Information Sensibility” Practices. *Social Sciences*, 14(4), 230.
- Hidayah, Hardian, Suryaningsih, F. (2021). Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(3), 552.
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 2(1), 369–378.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating for Democracy in a Partisan Age: Confronting the Challenges of Motivated Reasoning and Misinformation. *American Educational Research Journal*, 54(1), 8.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2019). Can media literacy education increase digital engagement in politics? *Learning, Media and Technology*, 44(2), 211–224.
- Kim, E., & Yang, S. (2016). Internet literacy and digital natives’ civic engagement: Internet skill literacy or Internet information literacy? *Journal of Youth Studies*, 19(4), 438–456.
- Latief, I. S., & Triuspita, N. (2024). Political education in the digital era to encourage first-time voter participation. *International Conference on Applied Social Sciences in Education*, 1(1), 71–76.
- Li, Y., & Li, G. (2022). The Impacts of Digital Literacy on Citizen Civic Engagement—Evidence from China. *Digital Government: Research and Practice*, 3(4), 1–12.
- Lilja, J., Eklund, N., & Tottie, E. (2024). Civic Literacy and Disinformation in Democracies. *Social Sciences*, 13(8), 405.
- McDougall, J., Readman, M., & Wilkinson, P. (2018). The uses of (digital) literacy. *Learning, Media and Technology*, 43(3), 275.
- Moon, S. J., & Bai, S. Y. (2020). Components of digital literacy as predictors of youth civic engagement and the role of social media news attention: the case of Korea. *Journal of Children and Media*, 14(4), 458–474.

- Nash, K., & Wakefield, R. (2025). Mapping the Pathways: Stigmergy Theory as a Lens for Analyzing e-Participation. *International Journal of Public Administration*, 1–15.
- Park, S., Lee, J. Y., Notley, T., & Dezuanni, M. (2023). Exploring the relationship between media literacy, online interaction, and civic engagement. *The Information Society*, 39(4), 250–261.
- Polizzi, G. (2025). Digital literacy and strategic (dis)engagement: examining how functional and critical digital literacy shapes participation. *Information, Communication & Society*, 1–2.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44.
- Ribeiro, N., Malafaia, C., & Ferreira, T. (2023). Lowering the voting age to 16: Young people making a case for political education in fostering voting competencies. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(3), 332.
- Römer, L. (2024). *Through Media and Digital Literacy Education Towards Civic Participation of Disadvantaged Youth* (pp. 201–223).
- Sarifin, M. R., Yusoff, N., & Muhamad Adnan, M. H. (2025). Social Media and Virtual Communities: Investigating Digital Engagement, Social Problem Management, and Economic Mobility. *PaperASIA*, 41(3b), 22–34.
- Schmidbauer, S., Becker, M., & Haug, S. (2024). Online Political Participation of Refugees in Germany: Analysis of a Survey in Bavaria. *Sage Open*, 14(4), 2.
- Senora, S. (2025). Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Generasi Pemilih Cerdas dan Kritis. *Jurnal Kajian Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 131–142.
- Setiansah, M., Nuryanti, N., Santoso, E., & Ayu, K. R. (2024). Women's Digital Literacy in Village Information System Use. *International Journal of Media and Information Literacy*, 9(2).
- Suhariyanto, D., & Rozak, A. (2025). Political Participation , Civic Education , and Social Media on Generation Z ' s Political Engagement. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 2(02), 161–170.
- Sukri, A., Kamar, H., Samsudin, D., & Shasrini, T. (2024). Literasi Digital: Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan Politik Dalam Pemilu 2024. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 5(2), 337–345.
- Taylor, J., & Gibson, L. K. (2017). Digitisation, digital interaction and social media: embedded barriers to democratic heritage. *International Journal of Heritage Studies*, 23(5), 408–420.
- Vaccari, C., & Valeriani, A. (2018). Digital Political Talk and Political Participation: Comparing Established and Third Wave Democracies. *Sage Open*, 8(2), 2.
- Wui, M. G. L., Claudio, J. S. R., Zhang, J., Reyes, C. R. R., Reyes, R. T. M., & Leviste, E. N. P. (2025). Role of Classroom Openness in Digital Literacy and Online Civic Engagement Among Filipino High School Students. *Journal of Applied Youth Studies*, 8(2), 287–306.